**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dan merata. Untuk itu peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu negara, juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. **Todaro dan Smith (2006)**, kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kontribusi tiap wilayah di Indonesia dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) sangat beragam. Struktur perekonomian didominasi oleh kegiatan - kegiatan yang berada di Pulau Jawa. Kontribusi Pulau Sumatra dalam membentuk PDB nasional pada tahun 2011 sebesar 23,5%, pada tahun 2012 sebesar 23,8% dan pada tahun 2013 sebesar 20,7%. Kontribusi Pulau Jawa dalam membentuk PDB nasional pada tahun 2011 sebesar 57,6%, pada tahun 2012 sebesar 57,5% dan pada tahun 2013 sebesar 82,2%. Sedangkan kontribusi Pulau Sulawesi, Kalimatan, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara dalam membentuk PDB nasional selalu dibawah 10% **(BPS 2014)**. Perbedaan kontribusi wilayah terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dikarenakan adanya perbedaan laju pembangunan di tiap daerah. Perbedaan ini disebabkan karena persebaran Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak merata. Selain itu perbedaan dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah juga turut berpengaruh.

Dalam hal ini pembangunan infrastruktur seyogianya dapat memperluas dan mempermudah akses publik untuk memperoleh berbagai macam sumber daya yang diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, dan menikmati berbagai fasilitas pelayanan dasar (jalan raya, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), serta menjamin ketersediaan infrastruktur dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain, dengan adanya pembangunan infrastruktur secara merata dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Keberadaan infrastruktur dalam perekonomian sangat penting sebagai pendorong peningkatan produktivitas output dan mobilitas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi serta hasil pembangunan berhubungan dengan infrastruktur, berkembang pendapat bahwa Indonesia sangat tertinggal dalam penyediaan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mencapai sasaran yang diinginkan **(Silalahi, 2014)**

Pembangunan infrastruktur, baik berupa infrastruktur jalan raya, jaringan listrik dan jaringan air bersih akan sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian. **Yoshino dan Nakahigashi (2000)**, menjelaskan bahwa infrastruktur memberikan dampak terhadap perekonomian melalui dua cara yaitu dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung. Dampak langsung dari adanya infrastruktur terhadap perekonomian ialah meningkatnya output dengan bertambahnya infrastruktur. Sedangkan dampak tidak langsung adalah mampu mendorong kenaikan aktivitas perekonomian yang akan meningkatkan modal baik swasta maupun pemerintah yang berakibat pada kenaikan output.

Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit **(Bapenas dan UNDP:2005)**.

Dalam hal ini, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan sehingga pengembangan infrastruktur sangat diperhatikan untuk menunjang perekonomian negara. Jawa Barat sebagai provinsi penyangga ibukota juga memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian sehingga pengembangan infrastruktur di Jawa Barat juga harus diberi perhatian agar mampu menopang pertumbuhan Jawa Barat maupun pertumbuhan daerah-daerah disekitarnya. Jawa Barat seringkali dijadikan tolak ukur kondisi ekonomi makro di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meningkat maka pertumbuhan ekonomi nasional juga meningkat, begitu pula sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Barat umumnya berasal dari besarnya pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan PDRB itu sendiri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mencerminkan kemampuan produksi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat tanpa memperhitungkan dari mana asal faktor produksi yang digunakan dalam proses produksinya. Nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi kemudian diperhitungkan menurut harga tahun dasar untuk dapat melihat pertumbuhan produksi secara riil.

Jika dilihat dari perkembangan nya, laju pertumbuhan ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 yang terendah ada pada Kabupaten Subang yaitu sebesar 0,60 persen. Akan tetapi, mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 sebesar 4,05 persen dan sebesar 5,02 persen pada tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012 ada pada Kota Bandung yaitu sebesar 8,53 persen dan Kota Bekasi yaitu sebesar 8,06 persen. Untuk tahun 2013 dan 2014 laju pertumbuhan ekonomi teringgi masih berada di Kota Bandung, sehingga dalam 3 tahun terakhir Kota Bandung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tertingi meskipun mengalami penurunan di tiap tahun nya. **(BPS Indonesia: PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2014)**.

Dengan melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2014 dilihat dari Kabupaten/Kota pertahunnya masih terjadi ketidakmerataan. Hal ini ditunjukan oleh laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2012-2014 selalu menjadi yang tertinggi dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang yang terendah pada tahun 2012. Oleh karena itu, diperlukan ada nya pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang kemajuan suatu daerah karena dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang ada, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena akses yang mudah serta banyaknya pendorong faktor produksi yang terjadi di daerah. **(Sanusi, 2004:8)** menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat bersangkutan.

**Tabel 1.1 Infrastruktur (Jalan, Listrik, dan Air Bersih) di Provinsi**

**Jawa Barat Tahun 2012-2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Panjang Jalan (PJ)/KM** | **Rasio Elektrifikasi (RE)/Persen** | **Air Bersih (AB)/M3** |
| **2012** | 22.733 | 75,33 | 327.882 |
| **2013** | 22.751 | 80,05 | 278.212 |
| **2014** | 22.751 | 83,77 | 304.818 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, sub sektor panjang jalan jika dilihat dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 sebesar 22.773 KM meningkat menjadi 22.751 pada tahun 2013 dan 2014 atau meningkat 18 KM. Sub sektor listik dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 meningkat sebesar 4,72 persen dan pada tahun 2014 sebesar 3,72 persen. Sub sektor air bersih pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar dari 49.670 M3, akan tetapi pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 304.818 M3 atau meningkat sebesar 26.606 M3. Kontribusi dari ketiga sub sektor tersebut cenderung mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan kontribusi ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengembangan sektor infrastruktur maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada sektor-sektor lainnya.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan mampu untuk meningkatkan kondisi pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Meningkatnya kondisi pembangunan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya efisiensi dalam kegiatan perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan ekonomi, pengembangan sektor infrastruktur perlu diperhatikan mengingat begitu pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan akan fasilitas infrastruktur dalam menunjang kegiatan perekonomian. Bertambahnya jumlah panjang jalan akan memperlancar arus perpindahan barang dan jasa serta memudahkan keterbukaan akses terhadap daerah disekitarnya. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat **(Ahmad Heryawan)** mengungkapkan dengan bertambahnya panjang jalan yang layak, dipastikan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang berimbas pada pergerakan ekonomi. Ketersediaan akses air bersih dan energi listrik dapat meningkatkan produksi rumah tangga maupun kegiatan industri yang pada akhirnya dapat memaksimalkan output yang dihasilkan.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan daerah. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah daerah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian, karena dapat mengatur kegiatan ekonomi kearah yang diinginkan. Salah satu tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah membiayai pembangunan infrastruktur. Utamanya untuk infrastruktur seperti sarana jalan, listrik, air bersih, dll. **Wagner** mengatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan perkapita negara tersebut.

Pengeluaran pembangunan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi Jawa Barat pada umumnya karena dengan meningkatnya pengeluaran pembangunan ini dapat menciptakan sarana dan prasarana seperti peningkatan jalan, air bersih maupun listrik yang secara tidak langsung akan direspon dengan meningkatnya jumlah investasi, ketersediaan lapangan kerja, produksi barang dan juga jasa yang akan mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Jika dilihat dari jumlah realisasi Anggaran Pengeluaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jenis pengeluaran pembangunan berasal dari anggaran belanja modal. Dilihat pada tahun anggaran 2012, mencapai Rp. 9.334.600.298. pengeluaran pembanguan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 11.710.021.513 dan diikuti tahun 2014 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 12.325.891.067. peningkatan dari tahun ke tahun ini dikarenakan realisasi pembangunan infrastruktur ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan jika dilihat dari per Kabupaten/Kota dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2014, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung memiliki pengeluaran pembangunan tertinggi yang cenderung meningkat di setiap tahun nya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat yang masih berfluktuaitif di setiap tahun nya. Pada tahun 2014 pengeluaran pembangunan Kabupaten Bogor merupakan yang tertinggi sebesar Rp. 1.385.239.522, kemudian di ikuti Kota Bandung Rp. 1.393.850.108 dan Kabupaten Bekasi Rp. 1.106.224.536. Sementara Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran pembangunan terendah pada tahun 2014 yaitu Kota Banjar sebesar Rp. 112.541.748, Kota Tasikmalaya Rp. 128.455.175, dan Kota Cirebon Rp. 131.656.412. **(BPS Jawa Barat: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2014)**

Jawa Barat yang secara geografis berbatasan dengan wilayah ibu kota negara Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Menurut **Deddy Widjaya** sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, jumlah ruas jalan yang ada saat ini sudah tidak sepadan dengan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan. Dampak dari kondisi tersebut adalah sering terjadi kemacetan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang berbagai jenis komoditi ekspor Jabar, khususnya dari kawasan Cikarang sebagai salah satu basis industri Jabar menuju Tanjung Priok. Akibat dari kondisi ini para pengusaha sering mengalami kerugian, karena harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya operasional transportasi yang mengalami penambahan hingga 30% dari biasanya.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bahwa kondisi infrastruktur di Jawa Barat meskipun mengalami peningkatan akan tetapi masih belum maksimal. Kondisi infrastruktur yang belum maksimal akan mengurangi daya tarik investor yang akan masuk ke Jawa Barat yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional, percepatan pembangunan di daerah-daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik dan air bersih akan menjadi faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dengan semakin banyaknya pembangunan jalan akan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke Jawa Barat sehingga berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Dari latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan tema **Analisis Pengaruh Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air Bersih) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011 - 2014.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah pokok yang dikemukakan dirumuskan sebagai berikut yaitu: Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk berbagai pihak :

1. Kepentingan akademis, memberikan tambahan pengetahuan dan informasi dalam wacana akademis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi perencanaan pembangunan daerah dan analisis infrastruktur Kabupaten/Kota sehingga dapat dijadikan masukan, referensi, serta perkembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Kepentingan praktis, diharapkan dapat membantu pihak - pihak perumus ataupun bagi para pengambil keputusan di pemerintahan yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Untuk penulis, untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung dan sebagai salah satu media latih untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari.